



RENSTRA TAHUN 2025-2029

DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

Jl. RA BASUNI NO. 8 JAMPIROGO SOOKO
MOJOKERTO Tlp. 0321 - 321539

Email: dinsosmojokertokab@gmail.com

Website:

dinsos.mojokertokab.go.id

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS SOSIAL
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029* dapat disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial selama lima tahun ke depan.

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2025–2029 serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya berkenaan dengan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, dan prioritas nasional. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang diharapkan mampu menjawab permasalahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan adanya Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, selanjutnya seluruh pelaksanaan program/kegiatan unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto harus mengacu kepada dokumen Renstra dimaksud. Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi tugas dan fungsi perangkat daerah, Renstra ini memberikan gambaran tentang kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif selama lima tahun kedepan. Harapannya semoga Renstra ini dapat menjadi acuan kerja yang efektif dan berkontribusi nyata dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mojokerto.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO



TRY RAHARJO MURDIANTO, S.STP., M.AP.

Pembina Tk I

NIP. 19870519 200602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 LATAR BELAKANG	4
1.2 LANDASAN HUKUM	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL	11
2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL	11
A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL	11
B. SUMBER DAYA DINAS SOSIAL	15
C. KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL	19
D. KELOMPOK SASARAN LAYANAN DINAS SOSIAL	22
E. POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	31
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL	39
A. PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS SOSIAL	39
B. ISU STRATEGIS	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
3.1 TUJUAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029	42
3.2 SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029	43
3.3 STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029	55
3.4 ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029	56
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
4.1 URAIAN PROGRAM	59
4.2 URAIAN KEGIATAN	60
4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF	61
4.4 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	86
4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL	89
4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	89
BAB V PENUTUP	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 menjadi instrumen penting dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan sosial daerah. Dokumen ini disusun sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus sebagai penjabaran visi, misi, dan program strategis Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 adalah “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil Dan Makmur”, yang mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta keberpihakan kepada kelompok rentan. Visi ini sejalan dengan peran strategis Dinas Sosial dalam melaksanakan fungsi pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni perubahan berbagai peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, maka disusun Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 47 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, maka Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai sebuah Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029. Untuk mewujudkannya maka diperlukan

upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima dan efisien, mengembangkan kinerja ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja sosial dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia

Dokumen Rancangan Akhir Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2025-2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini merupakan rencana menengah pembangunan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial 2025–2029 juga merupakan bagian dari komitmen Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan *good governance* melalui perencanaan berbasis data dan bukti. Perencanaan ini diharapkan mampu menyinergikan program pusat, provinsi, dan kabupaten serta memperkuat peran masyarakat dan lembaga sosial dalam pelaksanaan pembangunan sosial yang berkeadilan. Dengan demikian, penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjadi dokumen perencanaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan visioner. Renstra ini akan menjadi acuan bagi seluruh jajaran Dinas Sosial dalam mewujudkan visi daerah dan menjawab tantangan sosial secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 adalah:

- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1): “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja

Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;

- (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD;
- (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kota/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- (9) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- (10) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- (11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- (13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2024 mengatur tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;

- (14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- (15) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- (20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- (21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- (22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
- (23) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto;
- (24) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;

- (25) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
- (26) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
- (27) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- (28) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Tahun 2025–2029 dimaksudkan agar Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusunnya Dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Tahun 2025–2029 adalah:

- (1) Menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025–2029 kedalam tujuan, sasaran, dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif Dinas Sosial;
- (2) Menyajikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan Dinas Sosial;
- (3) Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan dan penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika penulisan berikut:

Bab I Pendahuluan

1. Latar belakang

- Memuat uraian pendahuluan yang secara rinci menggambarkan kondisi yang mendasari disusunnya Renstra secara umum.
2. Landasan Hukum
Memuat peraturan yang relevan dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial yang terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 3. Maksud dan Tujuan
Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang mengacu RPJMD, Penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, Rencana Kinerja Tahunan dan Strategi Pengelolaan Organisasi dalam pencapaian keberhasilan target pembangunan sosial.
 4. Sistematika Penulisan
Memuat uraian singkat tentang masing-masing bab dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial
Berisikan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial sesuai dengan dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 83 Tahun 2021
2. Sumber Daya Dinas Sosial
Memuat kondisi ketersediaan sumber daya di Dinas Sosial dalam menjalankan dan melaksanakan Program dan Kegiatan pembangunan Sosial
3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Memuat penentuan target Indikator Kinerja Utama dan pencapaian keberhasilan selama 5 (lima) tahun pada Dinas Sosial sebagai tolak ukur pencapaian keberhasilan di masa mendatang
4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial
Berisi kelompok sasaran pelayanan sosial pada Dinas Sosial.
5. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina Dinas Sosial sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
6. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial
Menggambarkan kondisi atau realita yang dapat disimpulkan dari kesenjangan realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia dan mengidentifikasi isu strategis sesuai dengan lingkungan dinamis yaitu isu nasional, regional, dan daerah yang dapat mempengaruhi Dinas Sosial baik secara langsung ataupun tidak langsung serta potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Sosial yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

1. Tujuan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029
2. Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan;
2. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
3. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah;
4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial;
5. Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Berisi uraian tentang kesimpulan, kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Dinas Sosial.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- (1) Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
- (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial;
- (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok dan fungsi organik dengan tata kerja sebagai berikut :

- (1) Sekretariat, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial untuk mengoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penataan organisasi;

- e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- h. dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - d. Menyusun bahan koordinasi di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan dinas di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial keluarga.

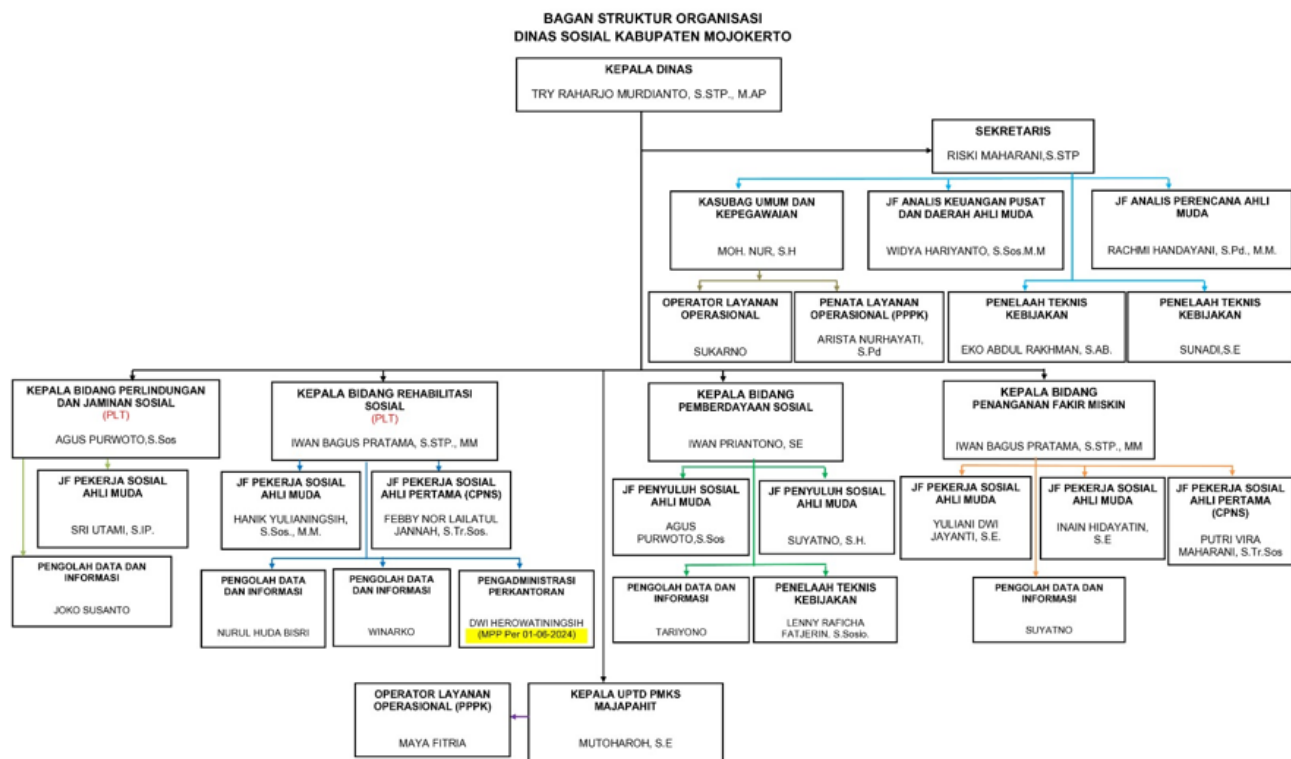
Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial korban keluarga;

- d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti dan/ atau lembaga, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/ atau lembaga, serta rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/ atau lembaga;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/ atau lembaga;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/ atau lembaga;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/ atau lembaga;
 - e. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - f. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan atau lembaga;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi pemberdayaan perorangan, keluarga, dan komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan, serta kepahlawanan dan restorasi sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas dan adat terpencil;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Bidang Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi identifikasi dan pengutan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, serta pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan, serta penataan lingkungan sosial.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin;
 - d. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
 - e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Bagan struktur organisasi Dinas Sosial disajikan dalam diagram berikut:



B. SUMBER DAYA DINAS SOSIAL

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebanyak 27 orang, yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin:

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	15
2	Perempuan	12
	JUMLAH	27

b. Jumlah pegawai berdasarkan penempatan:

NO	PENEMPATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN
1	Kepala Dinas	1	-
2	Sekretaris Dinas	-	1
3	Sekretariat	4	2

NO	PENEMPATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN
4	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	1
5	Bidang Penanganan Fakir Miskin	2	3
6	Bidang Rehabilitasi Sosial	2	2
7	Bidang Pemberdayaan Sosial	4	1
8	UPTD Pesanggrahan PKMS Majapahit	1	2
	JUMLAH	15	12

c. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan:

NO	JABATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN
1	Kepala Dinas	1	-
2	Sekretaris Dinas	-	1
3	Kepala Bidang	2	-
4	Kasubag	1	-
5	Kepala UPTD	-	1
6	Jabatan Fungsional	3	7
7	Staf	8	3
	JUMLAH	15	12

d. Jumlah pegawai berdasarkan golongan:

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	4
2	Golongan III	21

NO	GOLONGAN	JUMLAH
3	Golongan II	-
4	Golongan I	-
5	V	1
6	IX	1
	JUMLAH	27

e. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan:

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana	5
2	Sarjana	12
3	D4	3
4	SMA	7
5	SMP	-
6	SD	-
	JUMLAH	27

2) Sarana dan Prasarana Kerja

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto didukung dengan sarana prasarana kantor yang cukup memadai. Data sumber daya sarana dan prasarana yang merupakan aset Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Barang Inventaris Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	
	Tanah	62.740 m ²
2	Peralatan dan Mesin	
	Alat-alat Angkutan	
	- Roda 4	6 unit
	- Roda 2	7 unit

NO	URAIAN	JUMLAH
	Pompa Air	8 unit
	Portable Generating Set	2 Unit
	Lemari/Filling Cabinet Besi/Kaca/Arsip/Kayu/Pakaian	89 unit
	CCTV - Camera Control Television System	10 unit
	Alat Penghancur Kertas	2 unit
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3 unit
	Sound system/Speaker Active	4 unit
	Microphone	3 unit
	Televisi	10 unit
	A.C. Split	34 unit
	Kipas Angin	22 unit
	Tangga Alumunium	2 unit
	Blower	2 unit
	Gergaji Mesin	3 unit
	Gerobak Mesin	2 unit
	Alat Potong Rumput	2 unit
	Dispenser	1 unit
	Kasur/Kasur Busa/Spring Bed	107 unit
	Kursi Rapat/Kursi Putar/ Kursi Kerja	197 unit
	Sofa	4 unit
	Karpet	1 unit
	Horden	1 unit
	Tandon air	3 unit
	Tempat Tidur/Tempat Tidur Klien/Tempat Tidur Besi	83 unit
	Lemari Es	6 unit
	Kompor Gas	16 unit
	Rice Cooker	3 unit
	Blender	4 unit
	Mixer	2 unit
	Oven Aluminium	2 unit
	Tabung Gas	3 unit
	Magic Com	5 unit
	Mesin Cuci	4 unit
	Ranjang Besi	11 unit
	Camera/Camer Digital/Camera Film/Lensa Kamera	27 unit
	Proyektor	3 unit

NO	URAIAN	JUMLAH
	Printer	60 unit
	Drone	1 unit
	PC Komputer	35 unit
	Lap Top / Notebook	28 unit
	Scanner	3 unit
	LCD Projector/Infocus	2 unit
	Bangku Tunggu	2 unit
3	Gedung dan Bangunan	
	Gedung	3.426,87 m ²
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	Jalan dan jembatan	0 m ²
5	Aset tidak berwujud	
	Software	1 Unit

C. KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL

Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran pada Renstra 2021-2026 rata-rata mencapai target yang telah ditentukan. Namun, masih terdapat capaian kinerja beberapa indikator yang dirasa belum optimal dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan anggaran daerah. Capaian kinerja indikator sasaran Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis: Meningkatnya PPKS yang Mandiri, dengan indikator **"Persentase PPKS yang Mandiri"**.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Sosial telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Berikut jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial tahun 2019-2024:

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2019-2024

Status	Jumlah Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	196	719	196	77	77	0
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	7.865	8.358	7.861	5.555	5.553	0
Korban Bencana Alam	954	941	895	105	76	9409

Status	Jumlah Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pekerja Migran Bermasalah Sosial	24	12	19	0	3	0
Korban Tindak Kekerasan	17	10	15	2	1	0
Korban Trafficking	0	0	0	0	0	0
Korban Penyalahgunaan NAPZA	48	44	43	51	49	0
Bekas Warga Binaan LP	369	370	364	233	231	0
Kelompok Minoritas	119	121	113	23	20	0
Pemulung	265	253	257	286	282	7
Pengemis	108	99	105	68	67	5
Gelandangan	62	31	55	16	13	15
Tuna Susila	80	89	76	10	8	0
Penyandang Disabilitas	3,92	3.797	3.847	2.508	2.472	231
Lanjut Usia Telantar	11,99	13,55	9.525	2.369	1.137	64
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	21	16	19	4	3	0
Anak Korban Tindak Kekerasan	29	14	24	3	1	0
Anak Disabilitas	1,04	1.109	1.026	668	661	0
Anak Jalanan	106	109	100	16	13	0
Anak yang Berhadapan dengan Hukum	41	23	39	13	12	55
Anak Telantar	4.862	3.942	4.841	253	243	1014
Anak Balita Telantar	1,12	968	1.105	60	53	0

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Data jumlah PPKS dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan yang signifikan diberbagai kategori, yang merupakan indikator peningkatan efektivitas program kesejahteraan sosial. Penurunan jumlah PPKS ini menggambarkan keberhasilan program sosial dalam mengurangi kerentanan masyarakat diberbagai sektor. Namun, tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan angka-angka tersebut terus menurun dan tidak mengalami peningkatan ditahun-tahun mendatang.

Disamping itu, berdasarkan data capaian SPM urusan sosial di Kabupaten Mojokerto yang disajikan berikut juga menunjukkan pencapaian kinerja yang signifikan dalam hal rehabilitasi sosial dasar untuk kelompok rentan di luar panti dari tahun 2020-2024. Seluruh indikator menunjukkan keberhasilan 100%. Baik individu maupun kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti mendapatkan program rehabilitasi sosial secara menyeluruh.

Data Capaian SPM Dinas Sosial Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	0	100	100%	100%	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah Penyandang Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	35,99%	100	100%	100%	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Penyandang Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	0	100	100%	100%	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Penyandang Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	0	100	100%	100%	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani	100	100	100%	100%	100

Pelayanan yang diberikan mencakup berbagai aspek penting penyediaan makanan, sandang, kesehatan, dan layanan sosial lainnya seperti alat bantu, bimbingan fisik, mental, spritual, dan sosial diperbaiki secara optimal. Pada kelompok anak terlantar, secara khusus tercatat sebanyak 1035 orang yang menerima layanan penuh termasuk fasilitas pembuatan NIK, akses ke layanan pendidikan, dan kesehatan dasar, serta pelayanan reunifikasi keluarga. Selama 5 (lima) tahun terakhir, korban bencana alam dan sosial juga tertangani dengan baik. Namun masih terdapat kekurangan pada beberapa layanan seperti penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial bagi korban bencana.

Dalam pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial didukung oleh program-program antara lain Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Penanganan Bencana, dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Adapun pada Renstra Tahun 2025-2029, Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sesuai Visi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 yaitu **Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur** dan sesuai Misi ke-3 yaitu **Membangun Kemandirian Ekonomi pada Semua Tingkatan, Koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang Berbasis Masyarakat Guna Mewujudkan Keluarga yang Sejahtera** adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis:

Meningkatnya PPKS yang Mandiri

memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu **Persentase PPKS yang Mandiri**, yang merupakan acuan outcome yang harus dicapai Dinas Sosial kedepannya.

D. KELOMPOK SASARAN LAYANAN DINAS SOSIAL

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial mempunyai sasaran layanan sosial yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdiri dari:

- (1) Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria:

- Berasal dari keluarga fakir miskin
- Anak yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam rumah tangga)
- Ditelantarkan oleh orang tua/keluarga, atau
- Anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga
- Anak yang tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat SMP
- Makan makanan pokok kurang dari 2 kali sehari
- Memiliki pakaian kurang dari 4 stel layak pakai
- Bila sakit tidak diobati
- Yatim, Piatu, Yatim piatu
- Tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin
- Anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan bekerja.

- (2) Anak Balita Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan

pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria:

- Yatim piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orang tuanya pada orang lain, di tempat umum, rumah sakit, dan sebagainya.
- Tidak pernah/tidak cukup diberi ASI dan/atau susu tambahan/pengganti
- Makan makanan pokok tidak mencukupi
- Anak dititipkan atau ditinggal sendiri yang menimbulkan ketelantaran
- Apa bila sakit tidak mempunyai akses kesehatan modern (dibawa ke Puskesmas dan lain-lain)
- Mengalami eksploitasi.

- (3) Anak Yang Mengalami Masalah Hukum adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria:

- Anak diindikasikan (terlaporkan di kepolisian) melakukan pelanggaran hukum;
- Anak yang mengikuti proses peradilan
- Anak yang berstatus diversi (pengalihan hak asuh anak kepada pihak lain atas keputusan pengadilan); dan
- Anak yang telah menjalani masa hukuman pidana atau sedang mengikuti pembinaan dalam bimbingan kemasyarakatan lapas; serta
- Anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum
- Anak yang menjadi korban sengketa hukum akibat perceraian orang tua: perdata
- Anak yang karena suatu sebab menjadi saksi tindak pidana

- (4) Anak Jalanan adalah seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria:

- Anak yang rentan bekerja di jalanan karena suatu sebab
- Anak yang melakukan aktivitas di jalanan
- Anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan

- Jangka waktu di jalanan lebih dari 6 jam per hari dan dihitung untuk 1 bulan yang lalu
- (5) Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria:

- Anak dengan disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara
 - Anak dengan disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik
 - Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
 - Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
- (6) Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

Kriteria:

- Anak dalam situasi darurat;
 - Anak korban perdagangan;
 - Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
 - Anak korban eksploitasi;
 - Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
 - Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta
 - Anak yang terinfeksi HIV/AIDS
- (7) Lanjut Usia terlantar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria:

- Tidak ada keluarga yang mengurusnya.
- Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya,
- Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari

- Menderita minimal 1 jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya.
 - Lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin
 - Untuk Lanjut Usia Terlantar terbagi menjadi 2 kriteria yaitu :
 - LUT Potensial : yaitu lanjut usia terlantar yang masih mampu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan/jasa.
 - LUT Tidak Potensial : yaitu lanjut usia terlantar yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain
- (8) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.
- Kriteria:
- Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari.
 - Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari
 - Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai
 - Penyandang disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara
 - Penyandang disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik
 - Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
- (9) Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
- Kriteria:
- Seseorang (laki-laki / perempuan) usia 18 – 59 tahun
 - Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran (bordil), dan tempat terselubung (warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek).
- (10) Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
- Kriteria:

- Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun, tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar
 - Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya
 - Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas, dll.
- (11) Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
- Kriteria:
- Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
 - Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya
 - Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura-pura sakit, merintih, dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, sumbangan untuk organisasi tertentu
 - Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaaur dengan penduduk pada umumnya.
- (12) Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan pendaaurulang barang-barang bekas.
- Kriteria:
- Tidak mempunyai pekerjaan tetap atau mengais langsung dan mendaaurulang barang bekas, dll.
- (13) Kelompok Minoritas adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian.
- Kriteria:
- tidak dominan dengan ciri khas, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk
 - Mempunyai perilaku menyimpang
- (14) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan

masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria:

- Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
- Telah selesai atau segera keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana
- Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat
- Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap
- Berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya

(15) Orang Dengan HIV/AIDS adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria:

- Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
- Telah terinfeksi HIV/AIDS

(16) Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.

Kriteria:

- Seseorang (laki-laki / perempuan)
- Pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras, yang dilakukan sekali, lebih sekali atau dalam taraf coba-coba
- Secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang
- tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya

(17) Korban Trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang)

Kriteria:

- Mengalami tindak kekerasan
- Mengalami eksploitasi seksual
- Mengalami penelantaran
- Mengalami pengusiran (deportasi)

- Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu
- (18) Korban Tindak Kekerasan adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria:

- Individu, kelompok maupun kesatuan masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan bentuk-bentuk tindak kekerasan lainnya berakibat terganggunya fungsi sosial
- (19) Pekerja Migran Bermasalah Sosial adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.

Kriteria:

- Calon pekerja migran,
 - pekerja migran internal,
 - pekerja migran lintas negara,
 - eks pekerja migran
 - yang mengalami masalah sosial dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
- (20) Korban Bencana Alam adalah adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Kriteria:

- Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- (21) Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia

yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria:

- Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

(22) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria:

- Perempuan berusia 18 – 59 tahun
- Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan.
- Menjadi pencari nafkah utama keluarga
- Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

(23) Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

Kriteria:

- Penghasilan rendah atau berada di bawah garis sangat miskin yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan berdasarkan standar BPS per wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial)
- Keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga per tahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap per orang per tahun).
- Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga sakit.
- Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.
- Tidak memiliki harta (asset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas garis sangat miskin.
- Tinggal di rumah yang tidak layak huni.
- Sulit memperoleh air yang bersih

- (24) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar

Kriteria:

- Suami atau istri sering tanpa saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi
- Suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga
- Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkarm tidak mau bergaul/berkomunikasi
- Kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi

- (25) Keluarga Berumah Tidak Layak Huni adalah keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.

Kriteria:

- Kondisi Rumah:
 - a. Luas lantai perkapita < 4>
 - b. Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas
 - c. Tidak mempunyai akses MCK
 - d. Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, rumbia
 - e. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara
 - f. Tidak memiliki pembagian ruangan
 - g. Lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap
 - h. Letak rumah tidak teratur dan berdempeta
 - i. Kondisi rusak
- Kondisi lingkungan:
 - a. Lingkungan kumuh dan becek
 - b. Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar
 - c. Jalan setapak tidak teratur
- Kondisi keluarga:
 - a. Kebanyakan keluarga miskin (di bawah garis kemiskinan)
 - b. Kesadaran untuk ikut serta memiliki dan memelihara lingkungan pada umumnya rendah (ikut bersih kampung, ikut kerja bakti, membuang sampah sembarangan di sungai)

- (26) Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan–kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.

Kriteria:

- Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen.
- Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan.
- Pada umumnya terpencil secara geografis dan relative sulit dijangkau.
- Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem.
- Peralatan dan teknologinya sederhana.
- Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi.
- Terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

E. POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina Dinas Sosial sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdiri dari:

- (1) Penyuluh sosial yaitu tenaga yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program-program kesejahteraan sosial dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial.
- (2) Pekerja Sosial Profesional yaitu tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan sertifikasi dalam bidang pekerjaan sosial, berperan dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial dan pendampingan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- (3) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yaitu tenaga pendamping sosial yang ditugaskan di setiap kecamatan untuk membantu koordinasi dan pelaksanaan program-program sosial serta menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
- (4) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
- (5) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yaitu relawan sosial dari masyarakat yang membantu pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat desa/kelurahan, termasuk dalam pendataan dan fasilitasi bantuan sosial.

- (6) Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yaitu Relawan yang terlatih dalam penanggulangan bencana, berperan dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pascabencana di wilayah Kabupaten Mojokerto.
- (7) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yaitu organisasi sosial yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, seperti panti asuhan, panti jompo, dan lembaga rehabilitasi sosial lainnya.
- (8) Karang Taruna yaitu organisasi kepemudaan di tingkat desa/kelurahan yang berperan dalam pemberdayaan sosial ekonomi pemuda dan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kewirausahaan.
- (9) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yaitu lembaga yang memberikan layanan konsultasi dan mediasi untuk mengatasi permasalahan keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan konflik keluarga.
- (10) Keluarga Pioner yaitu keluarga yang menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai kesejahteraan sosial dan menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya.
- (11) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yaitu kelompok masyarakat yang secara swadaya dan partisipatif menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
- (12) Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) yaitu perempuan yang aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi penggerak dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat.
- (13) Dunia Usaha yaitu perusahaan dan pelaku usaha yang berkontribusi dalam program kesejahteraan sosial melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan kemitraan dengan pemerintah daerah.

Adapun jenis-jenis pelayanan sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Jenis-jenis Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN
1	PENGURUSAN SURAT KETERANGAN DTKS	MASYARAKAT YANG MASUK DALAM DTKS
2	PENGURUSAN SURAT REKOMENDASI BIAKESMASKIN	1. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum memiliki nomor induk kependudukan 2. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum memiliki nomor induk kependudukan 3. Terdampak bencana pada masa tanggap darurat dan/atau wabah pada kejadian luar biasa dalam skala Provinsi 4. Telah menjadi peserta JKN, tetapi manfaat pelayanan kesehatan tidak ditanggung 5. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), tetapi masih dalam proses integrasi ke dalam program JKN, sehingga manfaat pelayanan tidak diterima
3	PENGURUSAN SURAT KETERANGAN PENGURUSAN/PENGGANTIAN BUKU TABUNGAN/KKS	MASYARAKAT YANG MASUK DALAM DTKS
4	Memfasilitasi untuk mendapatkan alat bantu	Penyandang Disabilitas Fisik
5	Penanganan Orang dengan T4/ OT	- Anak Terlantar - Lansia Terlantar - Disabilitas Terlantar - Orang Terlantar
6	Rehabilitasi Ex ODGJ / Mr. X	Ex Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) / Orang Terlantar (OT) tanpa identitas atau Mr. X
7	Pendampingan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)	Anak Korban / Anak Saksi yang Berhadapan dengan Hukum
8	Pendampingan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)	- Orang dengan dugaan Tindak Pidana Ringan - Anak dengan dugaan Tindak Pidana Ringan
9	Pelayanan Adopsi Anak	Calon Orang Tua Anak (COTA)
10	Penyaluran Bantuan YAPI	- Anak Yatim - Anak Piatu - Anak Yatim Piatu
11	Penyaluran Bantuan Sosial ATENSI	- Kluster Disabilitas - Kluster Lanjut Usia - Kluster Kelompok Rentan - Kluster Anak
12	Pelayanan calon klien pelatihan	- Calon Klien PSBR - Calon Klien RSBKW - Calon Klien RSBL
13	Reunifikasi / Pemulangan PPKS	- Orang Terlantar - Anak Terlantar - Disabilitas Terlantar

Sedangkan jenis-jenis bantuan sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial, baik oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh daerah maupun program bantuan sosial dari APBD daerah antara lain:

Jenis-jenis Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

NO	JENIS BANTUAN	SUMBER PENDANAAN	SASARAN	KRITERIA
1	PKH	APBN	FAKIR MISKIN	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
2	SEMPAKO	APBN	FAKIR MISKIN	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
3	BANTUAN ATENSI	APBN	1. ANAK 2. LANSIA 3. DISABILITAS	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
4	BANTUAN ATENSI YAPI	APBN	1. YATIM 2. PIATU 3. YATIM PIATU	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS 3. Usia 1-18 Tahun 4. tidak menerima bansos PKH
5	PERMAKINAN POKMAS	APBN	LANSIA	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS 3. Usia 70 Tahun ke atas 4. tidak menerima bansos PKH/Sembako 5. KK tunggal
6	PENYERAHAN ALAT BANTU	APBD PROVINSI	Penyandang Disabilitas	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
7	ASPD +	APBD PROVINSI	Penyandang Disabilitas Berat	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
8	Bantuan Sosial Permakanan anak	APBD PROVINSI	FAKIR MISKIN USIA PRODUKTIF	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
9	Bantuan Sosial Permakanan Lanjut Usia	APBD PROVINSI	FAKIR MISKIN USIA PRODUKTIF	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
10	Program Keterampilan Kewirausahaan (Menjahit dan Tata Rias)	APBD PROVINSI	FAKIR MISKIN USIA PRODUKTIF	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
11	Program Keterampilan Kewirausahaan (Pijat)	APBD PROVINSI	FAKIR MISKIN USIA PRODUKTIF	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
12	Program Keterampilan Kewirausahaan (Sablon, Menjahit dan Komputer)	APBD PROVINSI	FAKIR MISKIN USIA PRODUKTIF	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
13	Program Keterampilan Kewirausahaan (Salon, Menjahit dan Tata Boga)	APBD PROVINSI	FAKIR MISKIN USIA PRODUKTIF	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
14	PKH +	APBD PROVINSI	KPM PKH LANSIA	USIA MINIMAL 70 TAHUN

NO	JENIS BANTUAN	SUMBER PENDANAAN	SASARAN	KRITERIA
15	KIP PUTRI JAWARA (Putri Tangguh Mandiri Jatim Wani Sejahtera)	APBD PROVINSI	PEREMPUAN MISKIN USIA PRODUKTIF YANG MEMILIKI USAHA MIKRO	1. Perempuan berusia 18 s/d 57 tahun saat diusulkan, masih produktif serta sehat jasmani dan rohani 2. Perempuan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau sedang dalam proses pengusulan atau yang akan diusulkan 3. Berdomisili tetap dan memiliki identitas kependudukan yang sah 4. Sudah memiliki embrio usaha dan berpotensi dalam ketrampilan di bidang usaha ekonomi produktif (kecuali peternakan dan pertanian) atau pekerjaan mandiri yang secara rutin menghidupi keluarga 5. Perempuan rentan yang menikah, janda, belum menikah namun menjadi tulang punggung atau membantu perekonomian keluarga 6. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak atau menjadi pengampu ekonomi keluarga yang membutuhkan penanganan khusus (dibuktikan dengan surat keterangan rentan ekonomi dan kondisi rentan lainnya dari desa/kelurahan)
16	KIP KPM JAWARA (Keluarga Penerima Manfaat Jatim Wani Sejahtera)	APBD PROVINSI	LAKI-LAKI MISKIN USIA PRODUKTIF YANG MEMILIKI USAHA MIKRO	1. Kepala Keluarga baik laki-laki atau perempuan berusia 18 s/d 57 tahun saat diusulkan, masih produktif serta sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mencantumkan status sebagai Kepala Keluarga) 2. Menikah sebagai Kepala Keluarga pencari nafkah utama bagi keluarga 3. Keluarga rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau sedang dalam proses pengusulan atau yang akan diusulkan 4. Berdomisili tetap dan memiliki identitas

NO	JENIS BANTUAN	SUMBER PENDANAAN	SASARAN	KRITERIA
				kependudukan yang sah, bukan penerima bansos PKH 5. Sudah memiliki embrio usaha dan berpotensi dalam ketrampilan di bidang usaha ekonomi produktif (kecuali peternakan dan pertanian) atau pekerjaan mandiri yang secara rutin menghidupi keluarga 6. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak atau menjadi pengampu ekonomi keluarga yang membutuhkan penanganan khusus (dibuktikan dengan surat keterangan rentan ekonomi dan kondisi rentan lainnya dari desa/kelurahan
17	KIP Eks PPKS JAWARA (Eks Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jatim Wani Sejahtera)	APBD PROVINSI	EKS KLIEN PELATIHAN DARI UPT DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	1. Usia produktif antara 18 s/d 58 tahun serta sehat jasmani dan rohani 2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) di wilayah Jawa Timur 3. Penerima manfaat adalah Eks Klien yang memiliki sertifikat kelulusan dan telah menerima bantuan stimulan peralatan kerja dari UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 4. Belum pernah dapat bantuan pengembangan/pemberdayaan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 5. Eks Klien masih aktif menjalankan usaha sesuai dengan keterampilan masing-masing dan sudah berkembang minimal 2 tahun sejak tahun kelulusan
18	PENYERAHAN ALAT BANTU	APBD KABUPATEN	Penyandang Disabilitas	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
19	PERMAKINAN LKSA	APBD KABUPATEN	anak dalam panti	anak dalam panti
20	PERMAKINAN SUMBERGLAGAH	APBD KABUPATEN	Masyarakat Eks Kusta	Masyarakat Dusun Sumberglagah Desa Tanjungkenongo
21	BANMAS PKH GRADUASI	APBD KABUPATEN		

NO	JENIS BANTUAN	SUMBER PENDANAAN	SASARAN	KRITERIA
22	BLT DBHCHT	APBD KABUPATEN	1. Buruh Pabrik Rokok 2. Buruh Tani Tembakau 3. Buruh Pabrik Rokok yang terkena PHK 4. Masyarakat Miskin Rentan (DTKS Non Bansos) yang ditetapkan oleh Pemerintah	1. Buruh Pabrik rokok yang diusulkan melalui Disnaker 2. Buruh Tani Tembakau yang diusulkan melalui Dinas Pertanian 3. Masyarakat Miskin Rentan yang masuk dalam DTKS/DTSN yang tidak menerima bansos PKH/Sembako
23	Bantuan Sosial UEP Karang Taruna	APBD KABUPATEN	KARANG TARUNA	- Karang Taruna Desa/Kel. - Ada SK Pengurus Karang Taruna - Ada Kegiatan Usaha Ekonomis Produktif (embrio UEP)
24	Bantuan Sosial UEP Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	APBD KABUPATEN	LKS	- LKS dikuatkan dengan Akte Pendirian (Notaris) - Sudah Terdaftar di Dinas Sosial (STP) - Memiliki Potensi Usaha

Dari semua jenis bantuan sosial yang diselenggarakan, tercatat alokasi bantuan sosial yang telah diselenggarakan pada tahun 2021-2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

*Data Penerima Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021-2024*

NO	JENIS BANTUAN	SASARAN	TAHUN				SUMBER DANA	KET
			2021	2022	2023	2024		
1	PKH	Masyarakat Miskin	n/a	38,171	31,753	30,087	APBN	
2	SEBAKO/ BPNT	Masyarakat Miskin	71,064	83,286	84,107	68,736	APBN	
3	Banmas Alat Bantu Disabilitas / Kursi Roda	Penyandang Disabilitas	n/a	n/a	25	29	APBD	
4	Permakanan Lansia	LANSIA	n/a	n/a	93	n/a	APBN	
6	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD)	Penyandang Disabilitas	n/a	n/a	72	82	APBD Prov	
7	Yapi	anak Yatim/Piatu	n/a	n/a	83	995	APBN	
8	Permakanan Sumberglagah	penyandang eks kusta yang masuk dalam DTKS	180	180	180	180	APBD	

NO	JENIS BANTUAN	SASARAN	TAHUN				SUMBER DANA	KET
			2021	2022	2023	2024		
9	BLT DBHCHT	Buruh Pabrik Rokok, Buruh Tani Tembakau, Masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Balita stunting, Ibu Hamil KEK, Balita Gizi Kurang, Disabilitas, Lansia >90 tahun yang terdaftar dalam DTKS tetapi belum menerima bansos PKH dan/atau BPNT)	-	5,054	5,794	7,462	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	
10	Banmas Karang Taruna		n/a	n/a	8	n/a		
11	Banmas KPM PKH		-	-	20	96	APBD	
12	PBI JK	Masyarakat Miskin	400,315	414,604	395,370	393,322	APBN	
13	KUBE		n/a	n/a	100		APBD Prov	
14	PKH PLUS	KPM PKH	n/a	n/a	416	735	APBD Prov	
15	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah Keluarga Miskin	-	100	-	-	APBN	Tiap rumah Rp. 15.000.000,-
16	Bantuan Usaha bagi WRSE	KK Wanita Miskin	-	-	60	-	APBD Prov.	Tiap KK Rp. 3.000.000,-
17	Kasur Busa dan Lemari Plastik	LKSA	26	8	-	-	APBD Kab.	
18	Beras	LKSA	41	41	41	25	APBD Kab.	
19	UEP Karang Taruna	Karang Taruna	-	-	8	-	APBD Kab.	
20	Bantuan Tempat Tidur (Ranjang Besi dan Kasur Busa Oscar)	LKS-ODGJ Griyo Welas Asih Mambaul Hikmah	-	-	-	50	APBD Kab.	

NO	JENIS BANTUAN	SASARAN	TAHUN				SUMBER DANA	KET
			2021	2022	2023	2024		
21	Alat Penyulingan Air Bersih dan Mesin Press Sepatu	LKSA Abdullah Latief Ds. Gemekan Kec. Sooko	-	-	2 Unit	-	APBN	Diserahkan langsung dari Kemensos ke LKSA

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

A. PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh di masyarakat. Melalui analisis mendalam, penyusunan rencana jangka menengah perlu mempertimbangkan isu maupun permasalahan yang kerap terjadi di wilayah sebagai rujukan dalam menyusun Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Dengan mengetahui permasalahan yang kerap muncul diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial dimasa datang.

Perumusan permasalahan bertujuan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat.

Permasalahan utama yang masih dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto antara lain:

1. Permasalahan validitas dan akurasi data penerima manfaat. Meskipun upaya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus dilakukan, masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara data dengan kondisi riil di lapangan. Akibatnya, program bantuan sosial

sering tidak tepat sasaran dan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

2. Rendahnya partisipasi dan literasi masyarakat terhadap program-program Dinas Sosial menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami prosedur, kriteria, atau manfaat dari layanan sosial yang tersedia, sehingga mengakibatkan minimnya pelaporan kasus, kurangnya inisiatif mandiri, dan rendahnya efektivitas pemberdayaan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial.

B. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Untuk lebih jelasnya, identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025-2029 (Tabel 2.1)

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS SOSIAL	PERMASALAHAN DINAS SOSIAL	ISU KLHS RELEVAN DENGAN DINAS SOSIAL	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SOSIAL			ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum optimalnya pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penanganan keluarga fakir miskin	Data DTKS belum valid	Masih banyak yang belum tepat sasaran	Capaian target SDG's masih menetapkan penanggulangan kemiskinan dan kelaparan merupakan salah satu prioritas	Isu kemiskinan masih menjadi program prioritas melalui berbagai macam program (PKH, BOS, JKN, dll)	Masih tingginya disparitas antara pertumbuhan ekonomi dengan angka kemiskinan di Jawa Timur	DTKS belum menggambarkan jumlah PPKS sesungguhnya
Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai kewenangan kabupaten	Rawan kolusi dan nepotisme dalam pengusulan DTKS	Masih banyak yang belum tepat sasaran		Kenaikan angka inflasi nasional yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan angka kemiskinan	Masih tingginya kemiskinan di Jawa Timur terutama di perkotaan yang berimplikasi pada berkembangnya PMKS jalanan.	PPKS belum tertangani dengan baik

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan misi adalah dua komponen penting dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Visi adalah gambaran ideal atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau pemerintahan di masa depan. Misi adalah langkah-langkah strategis atau cara-cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Misi lebih operasional dan konkret, karena biasanya dijabarkan dalam bentuk program, kebijakan, atau kegiatan nyata. Visi bersifat inspiratif dan memberikan arah umum dari semua kebijakan dan program yang dijalankan.

3.1 TUJUAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Baik tujuan maupun sasaran, keduanya merupakan bagian penting dari dokumen perencanaan untuk mengarahkan kinerja dan pelaksanaan program secara sistematis dan terukur dalam periode tertentu.

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 telah menetapkan Visi dan Misi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai berikut:

== CATUR ABHIPRAYA MUBAROK ==	
VISI	<i>“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”</i>
MISI 1	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik
MISI 2	Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat;
MISI 3	Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera;

== CATUR ABHIPRAYA MUBAROK ==	
MISI 4	Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan keempat misi tersebut di atas, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto melaksanakan misi ke-3 yaitu **Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera**. Kemudian Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto juga menetapkan tujuan berdasarkan misi yang diampu yaitu **Meningkatnya Kesejahteraan Sosial**. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah **Meningkatnya PPKS yang Mandiri**.

3.2 SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya. Indikator-indikator sasaran yang dimaksud disajikan pada tabel berikut:

TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029 (Tabel 3.3)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial		Indeks Kesejahteraan Sosial	57.50	57.75	58.00	58.25	58.50	58.75	
		Meningkatnya PPKS yang mandiri	Prosentase PPKS yang mandiri	0.022	0.024	0.029	0.034	0.039	0.044	

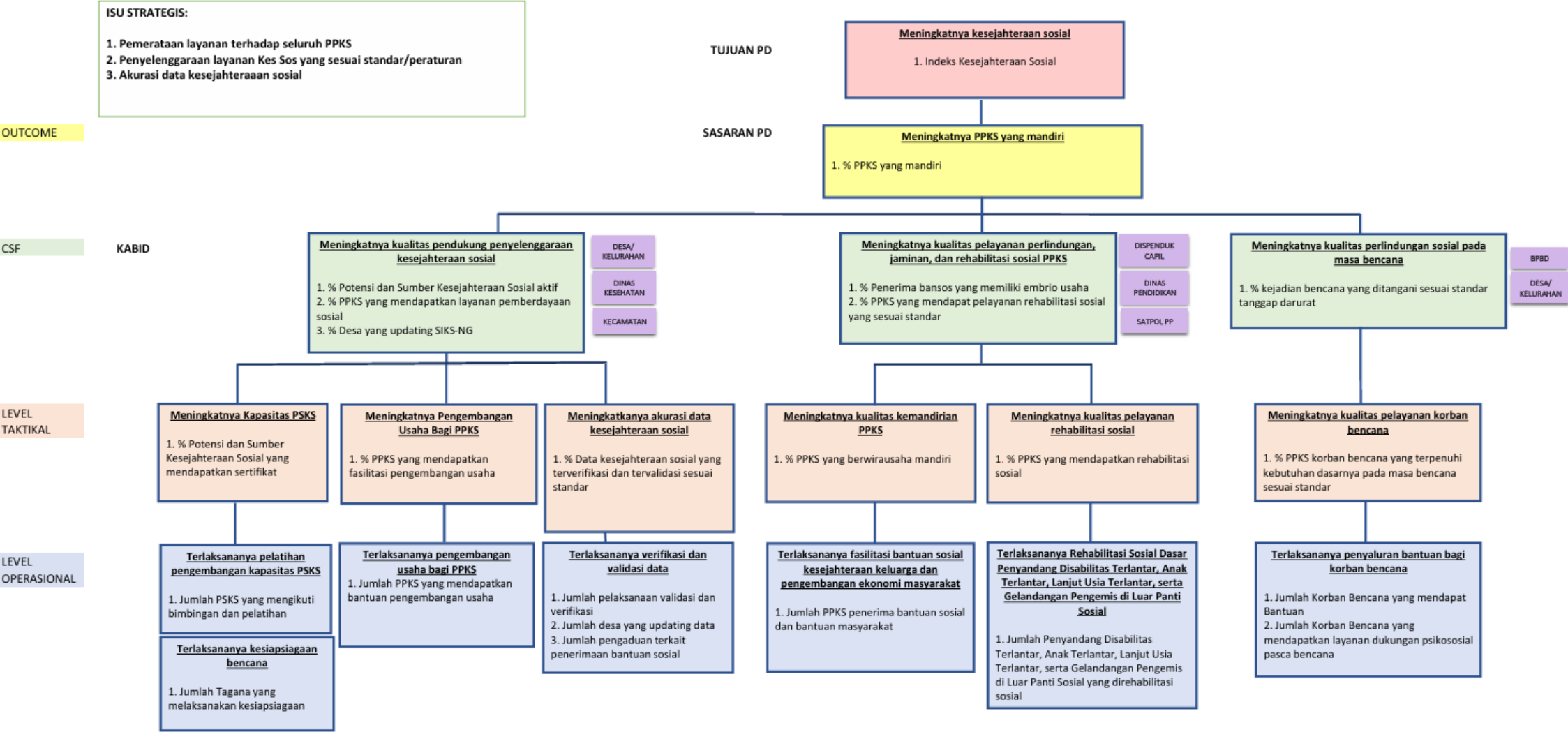
SASARAN PENUNJANG DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Meningkatnya kualitas tata kelola penunjang pencapaian kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.50	81.55	81.60	81.65	81.70	81.75	

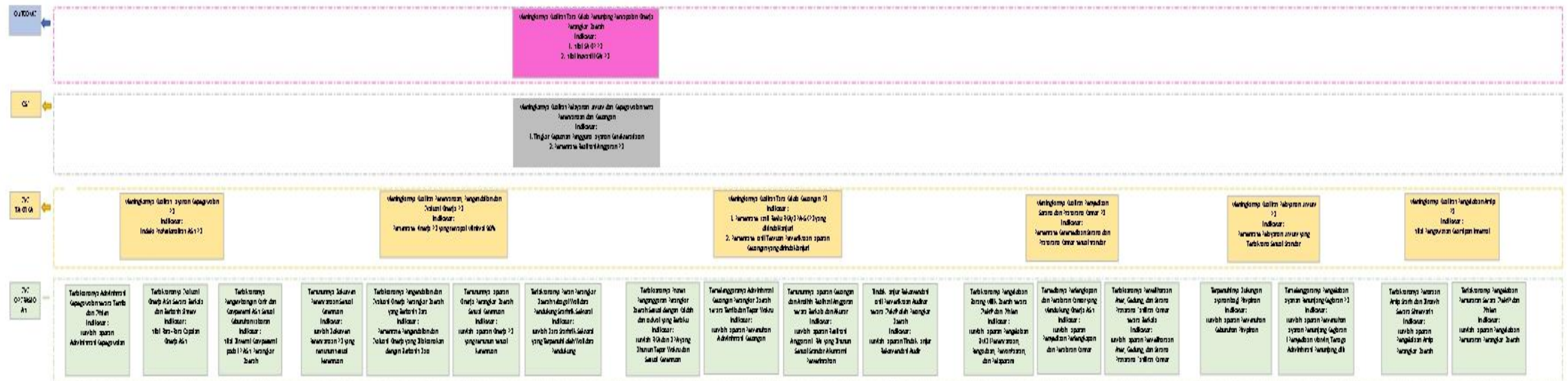
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Perangkat Daerah								
			Nilai Inovasi (IGA) Perangkat Daerah	85.20	85.40	85.70	86.00	86.40	86.90	

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2025-2029, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto telah mendesain pohon kinerja sebagai tolak ukur pembuatan cascading kinerja yang diharapkan menjadi gambaran desain keseluruhan kinerja Dinas Sosial yang dapat terukur dan dilaksanakan seluruh bidang teknis pelaksana pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Desain pohon kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Pohon Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto



Pohon Kinerja Program Rutin Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto



Cascading Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

Kepala PD					JF AHLI MADYA (Eselon III)										JF AHLI MUDA (Eselon IV)										PELAKSANA				
Tujuan Pokok	Indikator Tujuan Pokok	Target Pokok	Sasaran Strategis Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Target Pokok	Sasaran Program (Pokok)	Program SIPO	Indikator Program (Pokok)	Indikator Program SIPO	Target Pokok	Penanggung Jawab	Sasaran Kegiatan Pokok	Nomenklatur Kegiatan SIPO	Indikator Pokok	Indikator SIPO	Target	Penanggung Jawab	Sasaran Sub Kegiatan SIPO	Nomenklatur Sub Kegiatan	Indikator Pokok	Indikator Sub Keg SIPO	Target SIPO	Penanggung Jawab	Sasaran	Indikator Rincian Sub Kegiatan	Target	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	Kebutuhan Anggaran
Meningkatnya kesejahteraan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial		Meningkatnya PPKS yang mandiri	Persentase PPKS yang mandiri		Meningkatnya kualitas pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif		Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Kapasitas PSKS	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat		Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Terlaksananya pelatihan pengembangan kapasitas PSKS	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mengikuti bimbingan dan pelatihan	Jumlah Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	69	Penyuluh Sosial Ahli Muda (Suyatno, S.H.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	69	Pengolah Data dan Informasi		
																			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mengikuti bimbingan dan pelatihan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	65	Penyuluh Sosial Ahli Muda (Agus Purwoto, S.Sos)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	65	Pengolah Data dan Informasi		
						Meningkatnya kualitas pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif		Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Kapasitas PSKS	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat		Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terlaksananya kesiapsiagaan bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Teruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tagana yang melaksanakan kesiapsiagaan bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Teruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Kepala UPT Pengurangan Pmkh Mojopahit (Mutoharoh, S.E.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Teruna Siaga Bencana	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Teruna Siaga Bencana	50	Pengolah Data dan Informasi		
						Meningkatnya kualitas pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Desa yang updating SIKS-NG	Persentase Desa yang updating SIKS-NG		Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Meningkatnya akurasi data kesejahteraan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data kesejahteraan sosial yang tervalidasi dan tervalidasi sesuai standar	Persentase Data kesejahteraan sosial yang tervalidasi dan tervalidasi sesuai standar		Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Terlaksananya verifikasi data	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan validasi dan verifikasi	Jumlah Usulan Penindelayakan, Usulan yang Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	215000	Pekerja Sosial Ahli Muda (Yuliani Dwi Jayanti, S.E.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	215000	Pengolah Data dan Informasi		
																			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang updating data	Jumlah Usulan Penindelayakan, Usulan yang Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	215000	Pekerja Sosial Ahli Muda (Yuliani Dwi Jayanti, S.E.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	215000	Pengolah Data dan Informasi		
																			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan terkait penerimaan bantuan sosial	Jumlah Usulan Penindelayakan, Usulan yang Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	215000	Pekerja Sosial Ahli Muda (Yuliani Dwi Jayanti, S.E.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	215000	Pengolah Data dan Informasi		

Kepala PD				JF AHLI MADYA (Eselon III)				JF AHLI MADYA (Eselon III)				JF AHLI MUDA (Eselon IV)				PELAKSANA											
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PKKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan sosial	Persentase PKKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan sosial		Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Meningkatnya pengembangan usaha bagi PKKS	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PKKS yang mendapatkan fasilitas pengembangan usaha	Persentase PKKS yang mendapatkan fasilitas pengembangan usaha		Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Terlaksananya pengembangan usaha bagi PKKS	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah PKKS yang mendapatkan bantuan pengembangan usaha	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten / Kota	20	Kepala UPT Pasanggrahan Pmkh Mojopahit (Mutoharoh, S.E.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Ekonomi Masyarakat	20	Pengolah Data dan Informasi		
				Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi sosial PKKS	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha	Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha		Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Meningkatnya kualitas kemandirian PKKS	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PKKS yang berwirausaha mandiri	Persentase PKKS yang berwirausaha mandiri		Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Terlaksananya fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKKS penerima bantuan sosial dan bantuan masyarakat	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten / Kota	7430	Kepala UPT Pasanggrahan Pmkh Mojopahit (Mutoharoh, S.E.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7430	Pengolah Data dan Informasi		
				Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi sosial PKKS	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PKKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar	Persentase PKKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar		Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya kualitas pelayanan rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PKKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Persentase PKKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial		Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Perumahan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	850	Kepala UPT Pasanggrahan Pmkh Mojopahit (Mutoharoh, S.E.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Penyediaan Perumahan	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Penyediaan Perumahan	850	Operator Layanan Operasional		
																	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	50	Kepala UPT Pasanggrahan Pmkh Mojopahit (Mutoharoh, S.E.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	50	Operator Layanan Operasional		
																	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	53	Pekerja Sosial Ahli Muda (Hanik Yulianingsih, S.Sos., M.M.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	53	Pengolah Data dan Informasi		
																	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Pekerja Sosial Ahli Muda (Hanik Yulianingsih, S.Sos., M.M.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15	Pengolah Data dan Informasi		
																	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	50	Kepala UPT Pasanggrahan Pmkh Mojopahit (Mutoharoh, S.E.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50	Operator Layanan Operasional		

Kepala PO				JF AHLI MADYA (Eselon III)				JF AHLI MUDA (Eselon III)				JF AHLI MUDA (Eselon IV)				PELAKSANA														
														Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi sosial	10	Pekerja Sosial Ahli Muda (Hanik Yulianingsih, S.Sos., M.M.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi sosial	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi sosial	10		Pengolah Data dan Informasi							
														Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	15	Pekerja Sosial Ahli Muda (Hanik Yulianingsih, S.Sos., M.M.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	15		Pengolah Data dan Informasi							
														Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Pekerja Sosial Ahli Muda (Hanik Yulianingsih, S.Sos., M.M.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	15		Pengolah Data dan Informasi							
														Pemberian Layanan Kedaruratan Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Pekerja Sosial Ahli Muda (Hanik Yulianingsih, S.Sos., M.M.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/ kota	20		Pengolah Data dan Informasi							
													Meningkatnya kualitas pelayanan rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NARDA di Luar Panti Sosial	Persentase PRKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Persentase PRKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial		Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NARDA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	196	Pekerja Sosial Ahli Muda (Hanik Yulianingsih, S.Sos., M.M.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Penyediaan Perumahan	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Penyediaan Perumahan	196		Pengolah Data dan Informasi		
														Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota	15	Pekerja Sosial Ahli Muda (Hanik Yulianingsih, S.Sos., M.M.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	15		Pengolah Data dan Informasi							

Kepala PD				JF AHLI MADIYA (Eselon III)				JF AHLI MADIYA (Eselon III)				JF AHLI MUDA (Eselon IV)				PELAKSANA										
					Meningkatnya kualitas perlindungan sosial pada masa bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya kualitas pelayanan korban bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar	Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terlaksananya penyaluran bantuan bagi korban bencana	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang mendapat Bantuan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakaian 3 x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	10000	Kepala UPT Pesanggrahan Pmkis Mojopahit (Mutoharoh, S.E.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	10000	Pengolah Data dan Informasi		
																Penyediaan Sendang	Jumlah Korban Bencana yang mendapat Bantuan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	10000	Kepala UPT Pesanggrahan Pmkis Mojopahit (Mutoharoh, S.E.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Penyediaan Sendang	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Penyediaan Sendang	10000	Pengolah Data dan Informasi		
																Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapat layanan dukungan psikososial pasca bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	10000	Kepala UPT Pesanggrahan Pmkis Mojopahit (Mutoharoh, S.E.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	10000	Pengolah Data dan Informasi		
					Meningkatnya kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional	Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Persentase Makam yang terpenuhi pemeliharaannya	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Terlaksananya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	6	Penyuluh Sosial Ahli Muda (Suyatno, S.H.)	Tersedianya Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pendukung Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	6	Pengolah Data dan Informasi		

Cascading Program Rutin Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

KEPALA PD				ESELON III/ JF AHLI MADYA				ESELON IV/ JF AHLI MUDA				PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA					
Tujuan Pokok	Indikator Tujuan Pokok	Sasaran Strategis Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Sasaran Program (Pokok)	Program SIPD	Indikator Program (Pokok)	Penanggung Jawab	Sasaran Kegiatan Pokok	Nomenklatur Kegiatan SIPD	Indikator Pokok	Indikator SIPD	Penanggung Jawab	Sasaran Sub Kegiatan Pokok	Nomenklatur Sub Kegiatan SIPD	Indikator Pokok	Indikator Sub Keg SIPD	Penanggung Jawab
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, Akuntabel dan Responsif	K : Nilai SAKIP	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP PD 2. Nilai Inovasi (IGA) PD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan 2. Persentase Realisasi Anggaran PD	SEKRETARIS	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja PD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	ESELON IV/ JF AHLI MUDA YANG MENANGANI PERENCANAAN	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
* SESUAI TUJUAN UTAMA PD	* SESUAI INDIKATOR TUJUAN UTAMA PD	* SESUAI DI POKIN RUTIN	* SESUAI DI POKIN RUTIN										Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berbasis Data	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pengendalian dan Evaluasi Kinerja yang Dilaksanakan dengan Berbasis Data	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
													Tersusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja PD yang tersusun sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
													Terlaksananya Peran Perangkat Daerah sebagai Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Terpenuhi oleh Walidata Pendukung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
													Terlaksananya Peran Perangkat Daerah sebagai Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Terpenuhi oleh Walidata Pendukung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
								Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil Revisi RKA/DPA-SKPD yang ditindaklanjuti	Persentase Hasil Revisi RKA/DPA-SKPD yang ditindaklanjuti	ESELON IV/ JF AHLI MUDA YANG MENANGANI ANGGARAN & KEUANGAN	Terlaksananya Proses Penganggaran Perangkat Daerah Sesuai dengan Kaidah dan Jadwal yang Berlaku	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA dan DPA yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
													Terlaksananya Proses Penganggaran Perangkat Daerah Sesuai dengan Kaidah dan Jadwal yang Berlaku	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA dan DPA yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
													Terlaksananya Proses Penganggaran Perangkat Daerah Sesuai dengan Kaidah dan Jadwal yang Berlaku	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah RKA dan DPA yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
													Terlaksananya Proses Penganggaran Perangkat Daerah Sesuai dengan Kaidah dan Jadwal yang Berlaku	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah RKA dan DPA yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
								Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	ESELON IV/ JF AHLI MUDA YANG MENANGANI ANGGARAN & KEUANGAN	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah secara Tertib dan Tepat Waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pemenuhan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
													Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah secara Tertib dan Tepat Waktu	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Pemenuhan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
													Tersusunnya Laporan Keuangan dan Analisis Realisasi Anggaran secara Berkala dan Akurat	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang Disusun Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
													Tersusunnya Laporan Keuangan dan Analisis Realisasi Anggaran secara Berkala dan Akurat	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang Disusun Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
													Tersusunnya Laporan Keuangan dan Analisis Realisasi Anggaran secara Berkala dan Akurat	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang Disusun Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
													Tersusunnya Laporan Keuangan dan Analisis Realisasi Anggaran secara Berkala dan Akurat	Penyusunan Pelaporan Anggaran (LRA) yang Disusun Sesuai Standar Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang Disusun Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
													Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Auditor secara Efektif oleh Perangkat Daerah	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
							Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian PD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN PD	Indeks Profesionalitas ASN PD	Indeks Profesionalitas ASN PD	ESELON IV YANG MENANGANI KEPEGAWAIAN	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian secara Tertib dan Efisien	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
													Terlaksananya Administrasi Kepegawaian secara Tertib dan Efisien	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
													Terlaksananya Administrasi Kepegawaian secara Tertib dan Efisien	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
													Terlaksananya Evaluasi Kinerja ASN Secara Berkala dan Berbasis Sistem	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai ASN	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja ASN	Jumlah Dokumen Monitoring-Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT

KEPALA PD				ESELON III/ JF AHLI MADYA					ESELON IV/ JF AHLI MUDA					PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA				
Tujuan Pokok	Indikator Tujuan Pokok	Sasaran Strategis Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Sasaran Program (Pokok)	Program SIPD	Indikator Program (Pokok)	Indikator SIPD	Penanggung Jawab	Sasaran Kegiatan Pokok	Nomenklatur Kegiatan SIPD	Indikator Pokok	Indikator SIPD	Penanggung Jawab	Sasaran Sub Kegiatan Pokok	Nomenklatur Sub Kegiatan SIPD	Indikator Pokok	Indikator Sub Keg SIPD	Penanggung Jawab
									Terlaksananya Pengembangan Karir dan Kompetensi ASN Sesuai Kebutuhan Jabatan					Terlaksananya Pengembangan Karir dan Kompetensi ASN Sesuai Kebutuhan Jabatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Dimensi Kompetensi pada IP ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
									Terlaksananya Pengembangan Karir dan Kompetensi ASN Sesuai Kebutuhan Jabatan					Terlaksananya Pengembangan Karir dan Kompetensi ASN Sesuai Kebutuhan Jabatan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Dimensi Kompetensi pada IP ASN Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
									Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	ESELON IV YANG MENANGANI URUSAN UMUM PD	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
									Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien					Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
									Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien					Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
									Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien					Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
									Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien					Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan)	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
									Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	ESELON IV YANG MENANGANI URUSAN UMUM PD	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Mendukung Kinerja ASN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
									Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien					Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Mendukung Kinerja ASN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
									Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien					Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Mendukung Kinerja ASN	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
									Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	ESELON IV YANG MENANGANI URUSAN UMUM PD	Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
									Terlaksananya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD					Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
									Terlaksananya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD					Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
									Terlaksananya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD					Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
									Terlaksananya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD					Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
									Terpernuhinya Dukungan Layanan bagi Pimpinan					Terpernuhinya Dukungan Layanan bagi Pimpinan	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
									Terpernuhinya Dukungan Layanan bagi Pimpinan					Terpernuhinya Dukungan Layanan bagi Pimpinan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
									Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	ESELON IV YANG MENANGANI URUSAN UMUM PD	Terlaksananya Penataan Arsip Statis dan Dinamis Secara Sistematis	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
									Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	ESELON IV YANG MENANGANI URUSAN UMUM PD	Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
									Terlaksananya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD					Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
									Terlaksananya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD					Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT

KEPALA PD				ESELON IV/ JF AHLI MADYA					ESELON IV/ JF AHLI MUDA					PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA				
Tujuan Pokin	Indikator Tujuan Pokin	Sasaran Strategis Pokin	Indikator Sasaran Pokin	Sasaran Program (Pokin)	Program SIPD	Indikator Program (Pokin)	Indikator Program SIPD	Penanggung Jawab	Sasaran Kegiatan Pokin	Nomenklatur Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator SIPD	Penanggung Jawab	Sasaran Sub Kegiatan Pokin	Nomenklatur Sub Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator Sub Keg SIPD	Penanggung Jawab
									Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	ESELON IV YANG MENANGANI URUSAN UMUM PD	Terlaksananya Pengelolaan Persuratan Secara Efektif dan Efisien	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Pengelolaan Persuratan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
									Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	ESELON IV YANG MENANGANI URUSAN UMUM PD	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
														Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
														Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan)	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
														Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan)	Jumlah Unit Alat Angkut Darat Tak Bermotor yang Disediakan	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
														Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Pengadaan Mebel	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
														Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
														Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan)	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
														Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan)	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
														Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
														Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
														Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
									Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	ESELON IV YANG MENANGANI URUSAN UMUM PD	Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
														Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
														Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Laporan Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
														Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkut Darat Tak Bermotor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah Alat Angkut Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
														Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Laporan Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah Mebel yang dipelihara / direhabilitasi	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
														Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
														Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT

KERALA PD				ESELON III/ JF AHLI Madya					ESELON IV/JF. AHLI MUDA					PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA				
Tujuan Pokin	Indikator Tujuan Pokin	Sasaran Strategis Pokin	Indikator Sasaran Pokin	Sasaran Program (Pokin)	Program SIPD	Indikator Program (Pokin)	Indikator Program SIPD	Penanggung Jawab	Sasaran Kegiatan Pokin	Nomenklatur Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator SIPD	Penanggung Jawab	Sasaran Sub Kegiatan Pokin	Nomenklatur Sub Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator Sub Keg SIPD	Penanggung Jawab
														Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Laporan Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
														Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
														Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
														Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT
														Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	PELAKSANA/ JF AHLI PERTAMA DI SEKRETARIAT

3.3 STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra, perlu ditetapkan juga strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program kerja Dinas Sosial selama 5 (lima) tahun mendatang. Berikut langkah-langkah perumusan arah kebijakan Renstra Dinas Sosial:

STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029 (Tabel 3.3.1)

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur		
MISI 3	:	Membangun Kemandirian Ekonomi Bagi Industri pada Semua Tingkatan, Koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang Berbasis Masyarakat		
TUJUAN		SASARAN	ISU STRATEGIS	STRATEGI
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial		Meningkatnya PPKS yang Mandiri	DTKS belum menggambarkan jumlah PPKS	Penguatan basis data kesejahteraan sosial
				Perbaikan kualitas data dan integrasi sistem
			PPKS belum tertangani dengan baik	Penguatan layanan rehabilitasi sosial
				Peningkatan cakupan dan aksesibilitas program jaminan sosial
				Pemberdayaan dan kemandirian PPKS

Disamping itu, langkah selanjutnya adalah penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial. Penahapan Renstra Dinas Sosial disajikan pada tabel berikut:

PENAHAPAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO
(Tabel 3.4)

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan basis data tunggal sosial dan ekonomi nasional dalam rangka penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Penguatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Penguatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Konsolidasi dan evaluasi capaian program secara keseluruhan
Verval DTKS melalui pemutakhiran rutin dengan melibatkan desa/kelurahan	Pengurangan risiko kemiskinan ekstrem melalui penyaluran bansos tepat sasaran	Penguatan Data dan Jaringan PSKS melalui pendataan PSKS tingkat desa/kelurahan	Integrasi PSKS dengan SIKS-NG	Evaluasi kinerja berbasis RPJMD
Integrasi Data Sosial-Ekonomi sebagai basis penentuan penerima bansos lintas program (PKH, BPNT, BLT, dsb.)	Peningkatan cakupan dan aksesibilitas program jaminan sosial	Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui bantuan operasional, sarana prasarana, dan peningkatan kapasitas SDM	Penguatan Taruna Siaga Bencana (Tagana) melalui pelatihan kesiapsiagaan bencana, logistik, dan pertolongan darurat	Konsolidasi capaian program dan penguatan keberlanjutan program unggulan dalam rangka pemberdayaan dan kemandirian PPKS
Optimalisasi aplikasi SIKS-NG untuk input, updating, dan monitoring data	Peningkatan layanan rehabilitasi sosial komprehensif	Penguatan Kemampuan PSKS Perseorangan melalui peningkatan kapasitas SDM	Pemberdayaan Karang Taruna melalui fasilitasi kegiatan kepemudaan di bidang sosial	Persiapan Renstra 2031-2035 dengan pendekatan inklusif dan adaptif
Peningkatan kapasitas SDM pengelola data dan Standarisasi prosedur pengumpulan dan input data				

3.4 ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029

Arah dan kebijakan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 ini menjadi rangkaian kerja operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dimana dimaksud tugas dan fungsi Dinas Sosial selaras dengan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial. Berikut teknik dalam merumuskan arah kebijakan Rentra disajikan pada tabel di bawah ini.

TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS SOSIAL
(Tabel 3.5)

NO (1)	OPERASIONALISASI NSPK (2)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD (3)	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD (4)	KET. (5)
1	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan	Pemberdayaan dan kemandirian PPKS	
		Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan system regsosek agar tepat sasaran, tepat guna dan efisien	Penguatan basis data kesejahteraan sosial	
			Perbaikan kualitas data dan integrasi sistem	
		Perluasan penyediaan bantuan sosial, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan	Penguatan layanan rehabilitasi sosial	
		Perluasan penyediaan jaminan sosial, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan	Peningkatan cakupan dan aksesibilitas program jaminan sosial	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil. Oleh sebab itu, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto pada penyusunan program dan kegiatan perlu juga menetapkan indikator kinerja mengacu pada beberapa kriteria antara lain (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Disamping itu, pelaksanaan pembangunan daerah tidak lepas dari kebijakan-kebijakan maupun program-program yang telah ditetapkan pemerintah pusat melalui penetapan RPJMN 2025–2029. Diantaranya yaitu pembangunan Sekolah Unggulan atau Sekolah Rakyat di daerah sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendukung Prioritas Nasional 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, terutama bagi kelompok miskin dan kelompok rentan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam hal penyediaan lahan, dukungan anggaran daerah, serta integrasi dengan program pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu, pembangunan dan pengelolaan Sekolah Rakyat terintegrasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto melalui pemberian bantuan sosial berbasis pemberdayaan Masyarakat yang diakomodir dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, khususnya Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Kab/Kota; Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga. Bantuan sosial tersebut diarahkan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin, sekaligus mengintervensi ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan, bantuan usaha produktif, dan pendampingan sosial secara berkelanjutan. Integrasi kebijakan ini diperkuat melalui kolaborasi antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta desa dan lembaga masyarakat setempat.

Secara terperinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan Dinas Sosial Tahun 2025-2029 diuraikan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025-2029 (Tabel 4.5)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase PPKS yang mandiri	Persen	0.022	0.024	0.029	0.034	0.039	0.044	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81.50	81.55	81.60	81.65	81.70	81.75	
3	Nilai Inovasi (IGA) Perangkat Daerah	Nilai	85.20	85.40	85.70	86.00	86.40	86.90	

4.1 URAIAN PROGRAM

Upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial didukung oleh program-program sosial yang merupakan bagian dari pembangunan ekonomi sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Adapun fokus utama dalam pelaksanaan program sosial meliputi:

(1) Program Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial menjadi fokus strategis untuk membangun kemandirian masyarakat miskin dan rentan. Program ini mencakup pelatihan keterampilan kerja, bantuan usaha ekonomi produktif, serta penguatan kapasitas kelembagaan sosial masyarakat. Dengan pendekatan partisipatif, masyarakat didorong menjadi pelaku utama dalam menciptakan perubahan sosial dan ekonomi di lingkungan mereka sendiri.

(2) Program Rehabilitasi Sosial

Kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan korban kekerasan merupakan prioritas dari program rehabilitasi sosial. Melalui pendekatan berbasis kebutuhan individu maupun kelompok dan dukungan layanan sosial, program ini bertujuan mengembalikan fungsi sosial penerima manfaat secara optimal. Pelayanan dilaksanakan baik melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun kegiatan lapangan yang bersifat mobile dan responsif.

(3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program perlindungan dan jaminan sosial diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar warga miskin dan rentan melalui bantuan sosial reguler dan non-reguler. Melalui penyaluran bansos tunai, BPNT, serta dukungan permakanan lansia dan disabilitas berat, Dinas Sosial Mojokerto memastikan

hadirnya negara dalam situasi kerentanan sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat. Pemutakhiran data DTKS juga terus ditingkatkan untuk menjamin ketepatan sasaran.

(4) Program Penanganan Bencana

Dalam menghadapi risiko bencana sosial dan alam, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mengimplementasikan program penanganan bencana yang cepat, tanggap, dan terkoordinasi. Fasilitasi dapur umum, penyaluran logistik darurat, serta pendampingan psikososial bagi korban menjadi bagian dari respon kemanusiaan yang dilakukan. Sinergi dengan BPBD, TNI/Polri, serta relawan sosial terus diperkuat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan pemulihan pascabencana.

(5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pengelolaan Taman Makam Pahlawan menjadi bentuk penghormatan dan pelestarian nilai-nilai perjuangan bangsa. Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto bertanggung jawab dalam pemeliharaan TMP, pendataan veteran, serta pelaksanaan upacara dan ziarah nasional pada hari-hari besar kenegaraan. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi generasi muda untuk mengenang jasa para pahlawan dan menanamkan semangat nasionalisme.

4.2 URAIAN KEGIATAN

Kegiatan yang mendukung program kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui intervensi langsung terhadap kelompok rentan, miskin, dan terdampak bencana. Setiap kegiatan dirancang sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan-tujuan strategis Dinas Sosial dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Mojokerto 2025–2029.

Beberapa bentuk kegiatan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto antara lain:

(1) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan Non tunai

Menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin dan rentan sebagai bentuk jaminan sosial dasar.

(2) Pemutakhiran dan Verifikasi DTKS

Melakukan pembaruan dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar program sosial tepat sasaran dan berbasis data yang akurat.

(3) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial untuk Penyandang Disabilitas dan Lansia

Memberikan layanan langsung dan tidak langsung untuk mendukung keberfungsian sosial lansia, penyandang disabilitas, serta anak terlantar.

(4) Penguatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan sosial melalui pelatihan dan pemberian bantuan operasional untuk LKS dan Karang Taruna.

(5) Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

Mendukung kemandirian ekonomi keluarga miskin melalui pemberian bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan kerja.

(6) Penanganan Bencana Sosial dan Alam

Menyediakan bantuan logistik darurat, layanan dapur umum, dan pendampingan psikososial bagi korban bencana alam maupun konflik sosial.

(7) Pengelolaan dan Perawatan Taman Makam Pahlawan (TMP)

Melakukan pemeliharaan TMP, pendataan veteran, dan pelaksanaan upacara nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa pahlawan.

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

**TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029 (Tabel 4.2)**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial				Indeks Kesejahteraan Sosial		
		Meningkatnya PPKS yang Mandiri	Meningkatnya PPKS yang Mandiri		Persentase PPKS yang Mandiri		
				Meningkatnya kualitas pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Meningkatkannya Kapasitas PSKS	Persentase PSKS yang mendapatkan sertifikat	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pelatihan pengembangan kapasitas PSKS	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya		
				Meningkatnya kualitas pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Meningkatkannya Kapasitas PSKS	Persentase PSKS yang mendapatkan sertifikat	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya kesiapsiagaan bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
				Meningkatnya kualitas pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Desa yang updating SIKS-NG	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Meningkatkannya akurasi data kesejahteraan sosial	Persentase data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya verifikasi dan validasi Data	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Perbaikan yang dilaksanakan		
				Meningkatnya Pengembangan Usaha Bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan fasilitas pengembangan usaha	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pengembangan usaha bagi PPKS	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
				Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi sosial PPKS	Persentase penerima bantuan sosial yang memiliki embrio usaha	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Meningkatnya kualitas kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
				Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi sosial PPKS	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kualitas pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kualitas pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
				Meningkatnya kualitas perlindungan sosial pada masa bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Meningkatnya kualitas pelayanan korban bencana	Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya penyaluran bantuan bagi korban bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	Penyediaan Sandang	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	
				Meningkatnya kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Meningkatnya kualitas pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional	Persentase Makam yang terpenuhi pemeliharaannya	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	
				Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RUTIN
RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0				Nilai SAKIP		
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Inovasi (IGA) Perangkat Daerah		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan		Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian PD	Indeks Profesionalitas ASN PD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Penyediaan Bahan/Material	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran serta indikator-indikator kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 disediakan pendanaan APBD yang dipetakan pada masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana terlampir.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029 (Tabel 4.3)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline Perencanaan (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				16,775,764,340		17,911,154,570		18,853,810,444		19,292,064,252		19,917,945,511	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.10	81.55		81.60		81.65		81.70		81.75		
	Nilai Inovasi (IGA) Perangkat Daerah	3 Inovasi	85.40		85.70		86.00		86.40		86.90		
Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90.00%	90.00%	6,366,020,690	90.00%	6,467,436,555	90.00%	6,625,720,627	90.00%	6,759,833,105	90.00%	6,856,356,832	
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94.83%	96.12		96.14		96.16		96.18		96.20		
	Indeks Profesionalitas ASN	79,72	81.50		82.00		82.50		83.00		83.50		
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja PD	Persentase Kinerja PD yang tercapai minimal 90%	90%	90%	17,024,200	90%	20,000,000	90%	30,000,000	90%	30,000,000	90%	30,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	9	8,512,100	9	10,000,000	9	15,000,000	9	15,000,000	9	15,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	10	8,512,100	10	10,000,000	10	15,000,000	10	15,000,000	10	15,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline Perencanaan (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD	Persentase hasil temuan pemeriksaan laporan keuangan yang ditindaklanjuti	94.83%	96.15%	4,751,026,000	96.20%	4,831,026,000	96.25%	4,931,026,000	96.30%	5,031,026,000	96.35%	5,121,026,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	40	4,751,026,000	42	4,831,026,000	42	4,931,026,000	42	5,031,026,000	42	5,121,026,000	
1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	88%	90%	5,000,000	91%	5,000,000	92%	5,000,000	93%	5,000,000	94%	5,000,000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 laporan	14	4,000,000	14	4,000,000	14	4,000,000	14	4,000,000	14	4,000,000	
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian PD	IP ASN Perangkat Daerah	79.72	81.05	2,000,000	81.10	2,000,000	81.15	2,000,000	81.20	2,000,000	81.25	2,000,000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline Perencanaan (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				436,341,950		454,782,015		503,066,087		537,178,565		543,702,292		
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	88%	90%	100,000,000	91%	105,000,000	92%	112,500,000	93%	122,500,000	94%	122,500,000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	12	12	100,000,000	12	105,000,000	12	112,500,000	12	122,500,000	12	122,500,000		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana sesuai standar	88%	90%	326,341,950	91%	339,782,015	92%	380,566,087	93%	404,678,565	94%	411,202,292		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	12	75,000,000	12	80,000,000	12	95,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	12	20,000,000	12	20,000,000	12	25,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000		
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	12	12	156,341,950	12	157,282,015	12	165,566,087	12	170,178,565	12	176,702,292		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	75,000,000	12	82,500,000	12	95,000,000	12	104,500,000	12	104,500,000		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	88%	90%	10,000,000	91%	10,000,000	92%	10,000,000	93%	10,000,000	94%	10,000,000		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline Perencanaan (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana sesuai standar	88%	90%	347,595,840	91%	347,595,840	92%	347,595,840	93%	347,595,840	94%	347,595,840	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12	225,000,000	12	225,000,000	12	225,000,000	12	225,000,000	12	225,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	122,595,840	12	122,595,840	12	122,595,840	12	122,595,840	12	122,595,840	
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	90%	90%	807,032,700	90%	807,032,700	90%	807,032,700	90%	807,032,700	90%	807,032,700	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13	12	206,441,350	12	206,441,350	12	206,441,350	12	206,441,350	12	206,441,350	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	0	5	510,591,350	5	510,591,350	5	510,591,350	5	510,591,350	5	510,591,350	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline Perencanaan (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	8	8	90,000,000	8	90,000,000	8	90,000,000	8	90,000,000	8	90,000,000	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL													
Meningkatnya kualitas pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	75%	100%	381,028,760	100%	412,131,636	100%	423,344,800	100%	448,679,279	100%	458,547,208	
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota													
Meningkatnya Kapasitas PSKS	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat	75%	100%	381,028,760	100%	412,131,636	100%	423,344,800	100%	448,679,279	100%	458,547,208	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	349	65	160,202,400	65	176,222,640	65	178,844,904	65	188,229,394	65	189,552,334	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline Perencanaan (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	38	69	220,826,360.00	69.00	235,908,996.00	69.00	244,499,896	69	260,449,885	69	268,994,874	
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													
Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi sosial PPKS	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar	50%	0.21	1,893,299,150	0.50	2,082,629,065	1.00	2,290,891,972	1.25	2,319,981,169	1.50	2,371,979,286	
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial													
Meningkatnya kualitas pelayanan rehabilitasi sosial PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	0.17	0.17	1,688,002,250	0.30	1,856,802,475	0.50	2,042,482,723	0.80	2,066,603,735	1.00	2,113,485,810	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	1050	850	725,000,000	850	797,500,000	900	877,250,000	900	885,000,000	1000	902,250,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline Perencanaan (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	50	50	196,346,600	50	215,981,260	50	237,579,386	50	242,312,814	50	248,159,070	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	95	53	200,152,400	55	220,167,640	55	242,184,404	60	247,000,000	60	255,940,000	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15	15	15,000,000	15	16,500,000	15	18,150,000	15	18,500,000	15	18,870,000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	50	50	460,000,000	50	506,000,000	50	556,600,000	50	561,700,000	50	572,934,000	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10	5,000,000	10	5,500,000	10	6,050,000	10	6,100,000	10	6,222,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline Perencanaan (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	15	15	5,000,000	15	5,500,000	15	6,050,000	15	6,100,000	15	6,222,000	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	15	11,255,000	15	12,380,500	15	13,618,550	15	13,890,921	15	14,168,739	
Pemberian Layanan Kedaruratan Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20	70,248,250	20	77,273,075.00	20	85,000,383	20	86,000,000	20	88,720,000	
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial													
Meningkatnya kualitas pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	0.03	0.04	205,296,900	0.10	225,826,590	0.20	248,409,249	0.50	253,377,434	0.80	258,493,477	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	180	196	200,296,900	196	220,326,590	200	242,359,249	200	247,206,434	200	252,199,057	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline Perencanaan (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan / atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV / AIDS Kewenangan Kabupaten / Kota	15	15	5,000,000	15	5,500,000	15	6,050,000	15	6,171,000	15	6,294,420	
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				7,910,415,740		8,701,457,314		9,241,603,045		9,464,095,699		9,901,639,685	
Meningkatnya kualitas pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Desa yang updating SIKS-NG	55%	90%	326,572,240	91%	359,229,464	92%	365,152,410	93%	370,000,000	94%	398,134,417	
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
Meningkatkannya akurasi data kesejahteraan sosial	Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar	3%	5%	150,737,240	6%	165,810,964	7%	169,152,410	8%	170,000,000	9%	178,134,417	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	6,755,929	215,000	150,737,240	215,000	165,810,964	215,000	169,152,410	215,000	170,000,000	215,000	178,134,417	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline Perencanaan (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Pengembangan Usaha Bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	0.20	0.20	175,835,000	0.22	193,418,500	0.24	196,000,000	0.26	200,000,000	0.28	220,000,000	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	96	20	175,835,000	20	193,418,500	20	196,000,000	20	200,000,000	20	220,000,000	
Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi sosial PPKS	Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha	12.00%	12.05%	7,583,843,500	15%	8,342,227,850	17%	8,876,450,635	20%	9,094,095,699	22%	9,503,505,268	
Meningkatnya kualitas kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri	0.020	0.024	7,583,843,500	0.029	8,342,227,850	0.034	8,876,450,635	0.039	9,094,095,699	0.044	9,503,505,268	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	425,511	7,430	7,583,843,500	7,430	8,342,227,850	7,430	8,876,450,635	7,430	9,094,095,699	7,430	9,503,505,268	
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				210,000,000		231,000,000		254,100,000		279,510,000		307,461,000	
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial pada masa bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat	100%	100%	170,000,000	100%	187,000,000	100%	205,700,000	100%	226,270,000	100%	248,897,000	
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline Perencanaan (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas pelayanan korban bencana	Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar	100%	100%	170,000,000	100%	187,000,000	100%	205,700,000	100%	226,270,000	100%	248,897,000	
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	9,433	10,000	150,000,000	10,000	165,000,000	10,000	181,500,000	10,000	199,650,000	10,000	219,615,000	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	9,433	10,000	10,000,000	10,000	11,000,000	10,000	12,100,000	10,000	13,310,000	10,000	14,641,000	
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	9,433	10,000	10,000,000	10,000	11,000,000	10,000	12,100,000	10,000	13,310,000	10,000	14,641,000	
Meningkatnya kualitas pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	100%	100%	40,000,000	100%	44,000,000	100%	48,400,000	100%	53,240,000	100%	58,564,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline Perencanaan (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota													
Meningatkannya Kapasitas PSKS	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat	100%	100%	40,000,000	100%	44,000,000	100%	48,400,000	100%	53,240,000	100%	58,564,000	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	46	50	40,000,000	50	44,000,000	50	48,400,000	50	53,240,000	50	58,564,000	
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN													
Meningkatnya kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100%	100%	15,000,000	100%	16,500,000	100%	18,150,000	100%	19,965,000	100%	21,961,500	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota													
Meningkatnya kualitas pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional	Persentase Makam yang terpenuhi pemeliharaannya	100%	100%	15,000,000	100%	16,500,000	100%	18,150,000	100%	19,965,000	100%	21,961,500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline Perencanaan (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	6	6	15,000,000	6	16,500,000	6	18,150,000	6	19,965,000	6	21,961,500	

4.4 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada dasarnya kinerja organisasi perangkat daerah dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Pencapaian kinerja organisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Program prioritas pembangunan daerah. Secara terperinci, sub kegiatan yang mendukung program prioritas tersebut antara lain:

SUB KEGIATAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO YANG Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

(Tabel 4.4)

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEDULI PPKS (ANAK TERLANTAR DAN LANSIA TERLANTAR)	Terlaksananya bantuan permakanan (beras) bagi anak terlantar dan lansia terlantar	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
			Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Bentuk bantuan permakanan untuk eks penderita kusta Sumber Glagah
2	PEDULI PPKS (KELOMPOK MINORITAS)	Terlaksananya pemberian bantuan permakanan bagi eks penderita kusta di Sumberglagah	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
			Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	
3	PEDULI PPKS	Terlaksananya pemberian bantuan UEP LKS eks penderita Napza	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Program Pemberdayaan Sosial
			Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota	
4	MILENIAL KREATIF	Terlaksananya pemberian bantuan UEP LKS Karang Taruna	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Program Pemberdayaan Sosial

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
5	PEREMPUAN BERKARYA	Terlaksananya pemberian bantuan alat usaha KPM PKH	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
6	GERCEP STUNTING & PEDULI PPKS (MASYARAKAT MISKIN, DISABLITAS DAN LANSIA)	Terlaksananya pemberian bantuan BLT DBHCHT	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	

Disamping itu, Dinas Sosial dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 Dinas mengacu pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dengan memperhatikan penandaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut sub kegiatan tematik Dinas Sosial yang mendukung penandaan terkait:

Penandaan	Kode					Sub Kegiatan
Fungsi Pendidikan Kabupaten-Kota	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten-Kota	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Standar Pelayanan Minimal Kabupaten-Kota	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Penandaan	Kode					Sub Kegiatan
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial
Penurunan Stunting Kabupaten-Kota	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Kabupaten-Kota	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Keluarga
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial
Pengendalian Inflasi Kabupaten-Kota	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Keluarga
DBH CHT Kabupaten-Kota	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sosial di wilayah Kabupaten Mojokerto sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029, diperlukan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja pemerintah, IKU Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto antara lain:

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

(Tabel 4.5)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase PPKS yang mandiri	Persen	0.022	0.024	0.029	0.034	0.039	0.044	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81.50	81.55	81.60	81.65	81.70	81.75	
3	Nilai Inovasi (IGA) Perangkat Daerah	Nilai	85.20	85.40	85.70	86.00	86.40	86.90	

4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial yang mendukung langsung pencapaian kinerja Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2029, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang selaras dengan indikator kinerja pada level Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. IKK yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah:

INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2025-2029 (Tabel 4.6)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Melalui Dokumen Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029 diharapkan mampu mempertegas peran dan posisi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dalam konstelasi pembangunan kesejahteraan sosial. Disamping itu, keberhasilan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto tidak lepas dari kepedulian dan peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha.

Dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pemberdayaan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) jangka menengah yang bersifat dinamis terhadap perubahan sesuai perkembangan. Secara operasional, Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Dikemudian hari apabila terjadi perubahan-perubahan yang mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rancangan akhir rencana strategis yang telah disusun memerlukan penyesuaian, maka selama kurun waktu berlakunya rancangan akhir rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya sebagaimana Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebelumnya.

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan rencana strategis dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;
2. Dengan ditetapkannya Dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang sosial, terikat untuk

menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;

3. Dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2029;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Rancangan Akhir Renstra ini.

Mojokerto, September 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERTO



TRY RAHARJO MURDIANTO, S.STP., M.AP.

Pembina Tk I

NIP. 19870519 200602 1 002